

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN DAN KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir)

Oleh

Anggrelia Afrida

Dosen Tetap Yayasan Prodi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : angelakbar18@gmail.com. Telp/Hp : 0852-7256-4427

Info Artikel

Diterima 26 Sept 2016

Direview 17 Okt 2016

Disetujui 14 Nov 2016

ABSTRACT

This research was conducted in the accounting / financial administration on regional work units (SKPD) Local Government Ogan Ilir totaling 29 SKPD. SKPD each represented by three members, namely the Head of Finance, treasurer and financial reporting staff as respondents .. Results from this study that the quality of human resources, internal control of accounting, organizational commitment and application of accounting standards partially government did not significantly affect the timeliness of financial reporting yet use of information technology has an influence on the timeliness of financial reporting while the reliability of financial reporting, only the use of information technology that has no effect. Fourthly other variables actually have an influence on the reliability of financial reporting.

Keywords *Quality of Human Resources, Information Technology Utilization, Internal Control Accounting, Organizational Commitment, Implementation of the Government Accounting Standards, Financial Reporting timeliness and Reliability of Financial Reporting*

PENDAHULUAN

Demokratisasi yang menciptakan sebuah sistem yang *power share* pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah merupakan wujud dari otonomi daerah. Distribusi kewenangan disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik diperlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatakan

bahwa bentuk media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Delano, 2013). Informasi bermanfaat bagi pemakai. Informasi yang bermanfaat

adalah informasi yang mempunyai nilai (Suardjono, 2005). Informasi yang bermanfaat kalau informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

Opini WDP dinyatakan dalam keadaan, tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan ruang lingkup audit. Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Tidak Wajar (TW) yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Opini TW memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

Pada tahun 2010, Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya satu Pemerintah Daerah yaitu Kota Palembang sedangkan Pemerintah Daerah lainnya mendapatkan opini WDP. Opini WTP memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Pada tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP terus mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2012 ada satu Pemerintah Daerah yang mendapat opini TMP yaitu Kabupaten Empat Lawang. Opini TMP menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Pemerintah Daerah yang mendapat opini WTP sampai dengan tahun 2013 yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKI, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Oku Timur, sedangkan Kabupaten lainnya memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yaitu

Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kota Pagar Alam.

Menurut BPK jika belum diperolehnya opini WTP dari BPK hal inimenunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu lemahnya sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/ daerah dengan tertib, tidak sesuai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), adanya kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan dan kurangnya memadai kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Salah satu Pemerintah Daerah di wilayah provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan Opini WDP dari BPK RI adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dengan disetujuinya UUD No. 37 tahun 2003, maka Kabupaten Ogan Ilir terpisah dari Kabupaten OKI dan membentuk pemerintahan sendiri. Kabupaten Ogan Ilir terletak di jalur lintas timur Sumatera dan pusat pemerintahannya berada sekitar 35 km dari Kota Palembang (www.oganilirkab.go.id)

Sejak disetujuinya UUD No.37 tahun 2003, Kabupaten Ogan Ilir membentuk pemerintahan sendiri dan juga dituntut untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sendiri sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Ogan

Ilir, setelah LKPD disusun dan diaudit oleh BPK RI maka masih banyak permasalahan yang ditemukan diantaranya asset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, ataupun penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, masih ditemukan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang – undangan yang dapat mengakibatkan kerugian daerah, kecacuan administrasi dan ketidakefektifan pelaporan (BPK RI, 2013).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keandalan dan ketepatanwaktuan. Padahal saat sekarang ini, pemerintah menginginkan agar laporan keuangan baik pusat dan daerah disajikan secara andal dan tepat waktu, seperti yang diungkapkan oleh Halim dkk (2010) bahwa upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dalam artian andal dan tepat waktu. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan maka kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan sangatlah penting karena penyusunan laporan keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang laporan keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010).

Bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas yang tentunya disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang No.17 Tahun 2003, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Konsep transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen, yaitu sistem perencanaan strategik, sistem pengukuran kinerja, sistem pelaporan keuangan, saluran akuntabilitas publik (*channel of public accountability*), dan auditing sektor publik yang dapat

diintegrasikan ke dalam tiga bagian akuntansi sektor publik yaitu Akuntansi Manajemen Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, dan Auditing Sektor Publik.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masing – masing Kementerian Negara atau Lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat, satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/ Daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Berdasarkan SAP(2012), setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), Ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Sama halnya dengan pernyataan SAP(2012), yang menyatakan bahwa kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor – faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat –

lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu :

- a. Penyajian Jujur yaitu Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*) yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas yaitu Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik, DINAS DAERAH harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Menurut Mustafa dkk (2010), konstruk kualitas sumber daya manusia diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a. Kapasitas staf merupakan standarisasi kapasitas staf bagian keuangan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
- b. Tupoksi merupakan uraian peran dan fungsi yang jelas bagi seorang staf bagian keuangan/akuntansi yang ditunjang dengan sistem dan prosedur yang jelas.

c. Pengembangan merupakan upaya penguasaan dan pengembangan keahlian staf, baik formal maupun non-formal.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakuratan data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. *Output* lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Wiener (1982) dalam Hakim (2009) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat

sesuatu agar dapat menjunjung keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan meletakkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadinya. Menurut Mowday et al (1979) dalam Hakim (2009), komitmen menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai oleh organisasi. Komitmen organisasional bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada di dalam organisasi serta tekad diri untuk mengabdikan kepada organisasi, Porter et al., 1974 (Edfan Darlis, 2002) dalam Hakim (2009).

Dari definisi – definisi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dari suatu organisasi tertentu. Suatu keinginan untuk mengerahkan segala upaya atas nama organisasi. Suatu keyakinan, penerimaan, nilai dan tujuan pada organisasi tertentu. Dengan demikian dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi dalam diri seorang pegawai, tentunya akan membuat pegawai tersebut lebih giat karena kecintaan dan loyalitas pada instansi tempat dia bekerja. Komitmen organisasi yang tinggi akan membuat tujuan penyusunan laporan keuangan dapat tercapai. Kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan dan akuntabilitas laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini muncul karena komitmennya untuk melindungi instansi tempatnya bekerja dari berbagai bentuk kecurangan, penyelewengan dan tindakan melanggar hukum lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan

keuangan pemerintah di Indonesia, Roesyanto (2007) dalam Juwita (2013) menyatakan bahwa "rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah". Dalam *Government Finance Review*, kajian mengenai penerapan SAP juga dilakukan oleh Jeffrey Lesser (1992) yang menganalisis mengenai "GASB's implementation of the new measurement focus and basis on accounting" hasil pelaporannya menunjukkan bahwa perubahan dalam SAP sebagai dasar pelaporan keuangan akan terakses pada penurunan kredibilitas laporan keuangan pemerintah dan kemampuannya untuk dipahami oleh para pengguna, khususnya bagi entitas pelaporan yang belum sepenuhnya dapat menerapkan SAP yang baru.

Winfield (1978), Chang and Mos (1985), Boyne and Law (1991) dan Marston dan Shrivvers dalam Juwita (2013) meneliti tentang pentingnya laporan keuangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan dokumen yang paling komprehensif yang tersedia bagi publik dan sebagai alat pengungkapan utama.

Indriasari dan Nahartyo (2008), Darwanis dan Mahayani (2009) dan Mustafa dkk (2010) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Darwanis dan Mahayani (2009) menunjukkan bahwa secara simultan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan

ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menguji pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia melalui pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah membuktikan bahwa sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang tidak signifikan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Delanno dan Deviani (2013) menemukan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Secara tidak langsung pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah melalui sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan.

Rosalin dan Kawedar (2011) menguji faktor – faktor yang mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Rosalin dan Kawedar menambahkan variabel komitmen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan kualitas

sumber daya manusia tidak ada pengaruh terhadap keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan tidak semua staf pelaporan keuangan Badan Layanan Umum memiliki basic ilmu akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan kecuali pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Pengendalian intern akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Penemuan ini menunjukkan komitmen organisasi secara positif mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang meliputi Dinas, Badan dan Kantor dengan pokok bahasan terfokus pada ketepatanwaktuan pelaporan keuangan dan keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Yang dibatasi pada variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), Pengendalian Intern Akuntansi (X_3), Komitmen Organisasi (X_4), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_5), Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan (Y_1) dan Keandalan Pelaporan Keuangan (Y_2).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah skor variabel yang berkaitan dengan jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan yang berkaitan dengan variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, Y_1$ dan Y_2 . Data primer diperoleh melalui pengumpulan data kuesioner.

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden, kuesioner yang telah diisi dan kembali selanjutnya akan diteliti ulang dengan tujuan untuk memilih kuesioner yang memenuhi syarat untuk dianalisis sedangkan kuesioner yang terkategori tidak lengkap akan dihilangkan dari analisis.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil pada SKPD Kabupaten Ogan Ilir yang meliputi Dinas, Badan dan Kantor pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan tidak diikutsertakan dengan asumsi bahwa tidak termasuk sebagai Instansi Teknis Pemerintah Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD Kabupaten Ogan Ilir yang berjumlah 29 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 3 responden dengan kriteria Kasubag Keuangan, Bendahara dan Staff Keuangan. Seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel, dengan demikian sampel penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yakni sebanyak 87 responden.

Dari kuesioner yang didistribusikan kepada Kasubag Keuangan, Bendahara dan Staff Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir maka menghasilkan tingkat pengembalian kuesioner dengan jumlah kuesioner yang dibagikan ada 87 kuesioner. Kuesioner yang kembali ada 79 sedangkan sisanya tidak kembali atau dinilai cacat, yaitu kuesioner yang tidak lengkap mengisi pertanyaan dan tidak mengisi identitas diri sehingga tidak diperhitungkan sebagai data penelitian. Kuesioner yang kembali dalam kondisi lengkap dengan semua pertanyaan dijawab 100%, identitas diri responden juga dilengkapi dan dinilai baik

sehingga bisa dipergunakan untuk pengolahan data berjumlah 76 kuesioner.

Definisi operasional variabel dalam penelitian (X1) Kualitas Sumber daya manusia, (X2) Pemanfaatan Teknologi Informasi, (X3) Pengendalian Intern Akuntansi, (X4) Komitmen Organisasi, (X5) Penerapan standar akuntansi Pemerintah serta (X6) Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan dan (X7) Keandalan Pelaporan Keuangan.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel penjelas/ independen terhadap variabel tak bebas/ dependen (Gujarati, 2007). Teknik analisis yang digunakan meliputi : (1) Uji Validitas; (2) Uji Reliabilitas; (3) Uji F (*F-Test*); (4) Uji Normalitas; (5) Uji Autokorelasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sejak tahun 2008, telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka bersama-sama DPRD Kabupaten Ogan Ilir telah mensahkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang :

1. Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, yang terdiri dari: Sekretaris Daerah Kabupaten, 3

(tiga) Asisten Sekretaris, 10 (sepuluh) Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten.

2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
3. Dinas Otonom Daerah sebanyak 15 Dinas Otonom Daerah, yaitu : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Industri dan Perdagangan, Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan
4. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Inspektorat Kabupaten, Lembaga Teknis Badan sebanyak 9 Satuan Kerja dan Lembaga Teknis Kantor sebanyak 3 Satuan Kerja, serta 1 Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Penelitian dilakukan pada 15 Dinas, 1 Inspektorat, 9 Badan dan 4 Kantor di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dimana masing – masing Dinas, Inspektorat, Badan dan Kantor memperoleh 3 kuesioner sehingga total kuesioner yang didistribusikan sebanyak 87 buah. Berdasarkan kuesioner yang didistribusikan diketahui bahwa 79 kuesioner (90,80%) kembali dan 8 kuesioner (9,20%) tidak kembali, hal ini disebabkan saat pengambilan kuesioner berdasarkan batas waktu yang telah ditetapkan ternyata kuesioner belum diisi. Dari 79 kuesioner (90,80%) yang kembali selanjutnya diteliti lagi untuk memastikan apakah jawaban responden sudah lengkap atau belum, ternyata dari total tersebut

ada 3 kuesioner (3,80%) yang tidak lengkap dimana responden rata – rata hanya menjawab 50% dari total pertanyaan dan tidak mengisi identitas diri si responden, sisanyanya 79 kuesioner (90,80%) dikategorikan lengkap dengan jawaban lengkap 100% dan mengisi identitas diri.

Berdasarkan identifikasi jawaban responden maka disimpulkan kuesioner yang dianalisis sebanyak 76 kuesioner dengan karakteristik responden yang dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan dan masa kerja. Dari identifikasi diri responden, mayoritas responden berusia antara 30 – 40 tahun yaitu sebanyak 47 orang (61,84%). Responden termuda berusia \leq 30 tahun sebanyak 10 orang (13,16%) dan responden tertua berusia \geq 50 tahun sebanyak 4 orang (5,26%). Jenis kelamin dari responden didominasi oleh perempuan sebanyak 43 orang (56,58 %) dengan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33 orang (43,42%) dengan demikian jenis kelamin yang paling dominan adalah perempuan.

Tingkat pendidikan responden, pendidikan terendah SMA dan tertinggi S2. Berpendidikan S2 sebanyak 15 orang (19,74%), berpendidikan SMA sebanyak 2 orang (2,63%). Tingkat pendidikan terbanyak dari responden yang ada yaitu memiliki latar belakang pendidikan setara Sarjana (S1) sebesar 64,47 % yang terdiri dari 49 orang dengan masa kerja yang bervariasi dan seimbang antara yang sudah berpengalaman mulai dari 5 – 10 tahun yaitu sebanyak 35 orang (46,05%) dan pengalaman yang lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 24 orang (31,58 %) serta responden yang bekerja kurang dari 5 tahun sebanyak 17 orang (22,37 %).

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan dari variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, Y_1$ dan Y_2 adalah valid karena terbukti bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,2319) dengan tingkat kesalahan 5 %.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dari semua butir pertanyaan dari variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, Y_1$ dan Y_2 dengan melihat nilai *Cronbach Alphas* dibandingkan dengan r_{tabel} (0,2319)

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Berdasarkan hasil uji signifikansi hanya ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu variabel X_2 dengan nilai $t_{hitung} = 2,385 > t_{tabel} = 1,994$ dengan nilai signifikansi 0,20 sehingga bisa diartikan H_0 ditolak dan H_1 diterima sedangkan variabel independen lainnya nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yang terdiri dari X_1 nilai $t_{hitung} = -0,626$, X_3 nilai $t_{hitung} = 1,020$, X_4 nilai $t_{hitung} = 1,575$ dan X_5 nilai $t_{hitung} = 0,215$. Nilai signifikansi $> 0,050$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hasil uji terhadap keandalan pelaporan keuangan yaitu hanya ada satu yang tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan yaitu variabel X_2 nilai t_{hitung} sebesar - 0,643 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana nilai $t_{tabel} = 1,994$ dengan nilai signifikansi 0,522 sehingga bisa diartikan H_0 diterima dan H_1 ditolak sedangkan variabel independen lainnya nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang terdiri dari X_1 nilai $t_{hitung} = 2,778$, X_3 nilai $t_{hitung} = -2,760$, X_5 nilai $t_{hitung} = 7,871$ dan X_5 nilai $t_{hitung} = 2,154$. Nilai signifikansinya $> 0,050$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji signifikansi variabel dependen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan diketahui bahwa nilai $F_{hitung} = 7,493 > F_{tabel} =$

2,35 dengan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,50$. Nilai R^2 sebesar 0,349 atau 34,9% ini berarti variabel X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 dapat menjelaskan variabel Y_1 sebesar 34,9% sedangkan sisanya 65,1% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil uji signifikansi variabel dependen terhadap keandalan pelaporan keuangan diketahui bahwa nilai $F_{hitung} = 87,602 > F_{tabel} = 2,35$ dengan probabilitas sebesar $0,000 < 0,50$. Nilai R^2 sebesar 0,862 atau 86,2% ini berarti variabel X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 dapat menjelaskan variabel Y_2 sebesar 86,2% sedangkan sisanya 13,8% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian.

Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Hasil uji normalitas mengindikasikan bahwa variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, Y_1$ dan Y_2 berdistribusi

$$Y_1 = 0,497 - 0,126X_1 + 0,326X_2 + 0,159X_3 + 0,351X_4 + 0,034X_5 + \varepsilon$$

$$Y_2 = -0,541 + 0,298X_1 - 0,047X_2 - 0,229X_3 + 0,930X_4 + 0,183X_5 + \varepsilon$$

Pembahasan

Pengujian hipotesis (H_{1a}) dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< \alpha$ 0,050. Nilai t_{tabel} pada α 0,050 = 1,994. Variabel X_1 nilai $t_{hitung} = -0,626$ dengan nilai signifikansi 0,533 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,626 < 1,994$ atau nilai signifikansi $0,533 > 0,050$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai negatif = $-0,126$ dengan nilai t_{hitung} juga bernilai negatif = $-0,626$ yang menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y_1 .

Penelitian ini membuktikan bahwa X_1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sehingga

normal karena nilai Kolmogorov-Smirnov berada diatas 0,050.

2. Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi bahwa model regresi Y yang digunakan bebas dari autokorelasi dengan nilai Durbin – Watson yaitu Y_1 sebesar 1,625 dan Y_2 sebesar 1,670. Nilai DW berada diantara -2 sampai dengan +2 yang berarti tidak ada autokorelasi dan data menunjukkan layak untuk diteliti.

3. Analisis Regresi Berganda

Variabel yang diregresi meliputi X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 . Adapun hasil regresi berganda untuk model penelitian Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y_1) dan hasil regresi berganda untuk model penelitian Keandalan Pelaporan Keuangan (Y_2) dengan model penelitian sebagai berikut :

hipotesis (H_{1a}) dari penelitian ini ditolak. Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan kondisi kuantitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan masih kurang dari sisi jumlah dan di beberapa satuan kerja hanya memiliki satu pegawai akuntansi. Hasil hipotesis ini didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengujian hipotesis (H_{1b}), untuk variabel X_2 nilai $t_{hitung} = 2,385$ dan nilai signifikansi 0,020 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu

$2,385 > 1,994$ atau nilai signifikansi $0,020 < 0,050$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu $0,326$. Penelitian ini membuktikan bahwa X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y_1 sehingga hipotesis (H_{1b}) dari penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Jogiyanto (1995) dalam Galuh dan Deviani (2013) yang menjelaskan bahwa informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (keterpahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Temuan ini juga mendukung literatur – literatur yang lain yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam organisasi termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan serta penyiapan laporan keuangan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal ini menggambarkan betapa sangat membantunya teknologi informasi dalam kecepatan pencapaian tujuan.

Pengujian hipotesis H_{1c} ,untuk variabel X_3 nilai t_{hitung} adalah $1,020$ dengan nilai signifikansi $0,311$ dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,020 < 1,994$ atau nilai signifikansi $0,311 > 0,050$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu $0,159$. Penelitian ini membuktikan bahwa X_3 tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sehingga hipotesis (H_{1c}) dari penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosalin dan Kawedar (2011) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Temuan ini tidak mendukung teori yang menjelaskan tentang ketepatan waktu yaitu tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Sama halnya dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (2012), yang menyatakan bahwa kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor – faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

Pengujian hipotesis H_{1d} , untuk variabel X_4 nilai $t_{hitung} = 1,575$ dengan nilai signifikansi $0,120$ dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,575 < 1,994$ atau nilai signifikansi $0,120 > 0,050$. Nilai koefisien β dari variabel X_4 bernilai positif yaitu $0,351$. Penelitian ini membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sehingga hipotesis (H_{1d}) dari penelitian ini ditolak.

Pengujian hipotesis H_{1e} , untuk variabel X_5 nilai $t_{hitung} = 0,215$ dengan nilai signifikansi $0,830$ dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,215 < 1,994$ atau nilai signifikansi $0,830 > 0,050$. Nilai koefisien β dari variabel X_5 bernilai positif yaitu $0,034$. Penelitian ini membuktikan bahwa X_5 tidak berpengaruh

Pengujian hipotesis (H_{1f}), dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Hipotesis

diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< \alpha$ 0,050. Nilai F_{tabel} ($df_1 = 6 - 1 = 5$ | $df_2 = 76 - 6 = 70$) pada α 0,050 adalah 2,35. Nilai F_{hitung} untuk variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 secara simultan nilai $F_{hitung} = 7,493$ dan nilai signifikansi 0,000 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $7,493 > 2,35$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,050$. Penelitian ini membuktikan bahwa X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y_1 sehingga hipotesis (H_{1f}) diterima.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan kemampuan menyajikan informasi tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semua koefisien korelasi dari variabel yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak sama dengan nol. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hal ini berarti secara simultan X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 memiliki pengaruh terhadap Y_1 .

Pengujian hipotesis (H_{2a}), untuk variabel X_1 nilai $t_{hitung} = 2,778$ dan nilai signifikansi 0,007 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,778 > 1,994$ atau nilai signifikansi $0,007 < 0,050$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,298. Penelitian ini membuktikan bahwa X_1 berpengaruh signifikan terhadap Y_2 sehingga hipotesis (H_{2a}) diterima.

Pada tahun 2015, pendidikan pegawai pada sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan di SKPD Ogan Ilir mayoritas berlatarkan pendidikan sarjana baik itu D3 sebesar 13,16 % ataupun S1 sebesar 64,47% bahkan S2 sebesar 19,74 % sedangkan yang berlatarkan SMA hanya sebesar 2,63%. Selain dari

peningkatan pendidikan, temuan perbedaan ini boleh jadi memberikan dukungan mengenai saling korban (*trade – off*) antara ketepatan waktu dan keandalan untuk mendapatkan kebermanfaatannya sebagaimana dijelaskan dalam bab II.

Pengujian hipotesis (H_{2b}) untuk variabel X_2 nilai $t_{hitung} = -0,643$ dan nilai signifikansi 0,522 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,643 < 1,994$ atau nilai signifikansi $0,522 > 0,050$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai negatif yaitu $-0,047$ dan nilai t_{hitung} juga bernilai negatif yaitu $-0,643$ yang menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y_2 . Penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan sehingga hipotesis (H_{2b}) ditolak.

Jika ada *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap lingkungan dan data yang disimpan mudah rusak seperti yang sudah dijelaskan di bab II. Yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakhandalan laporan keuangan yang dihasilkan seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Donnelly et al (1994) dalam Mustofa dll (2010) yang menemukan bahwa sistem/ teknologi informasi (komputer dan jaringan) yang dimiliki pemerintah daerah di Skotlandia belum begitu baik, yang berakibat terhadap kurang baiknya kualitas hasil pekerjaan.

Pengujian hipotesis (H_{2c}) untuk variabel X_3 nilai t_{hitung} adalah $-2,760$ dan nilai signifikansi 0,007 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-2,760 > 1,994$ atau nilai signifikansi $0,007 < 0,050$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai negatif

= -0,229 dan nilai t_{hitung} juga bernilai negatif = -2,760 yang menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y_2 . Penelitian ini membuktikan bahwa X_3 berpengaruh signifikan terhadap Y_2 sehingga hipotesis (H_{2c}) diterima.

Pengujian hipotesis (H_{2d}) untuk variabel X_4 t_{hitung} = 7,871 dan nilai signifikansi 0,000 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,871 > 1,994$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,050$. Nilai koefisien β dari variabel X_4 bernilai positif yaitu 0,930. Penelitian ini membuktikan bahwa X_4 berpengaruh signifikan terhadap Y_2 sehingga hipotesis (H_{2d}) diterima.

Pengujian hipotesis (H_{2e}) untuk variabel X_5 nilai t_{hitung} = 2,154 dan nilai signifikansi 0,035 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,154 > 1,994$ atau nilai signifikansi $0,035 < 0,050$. Nilai koefisien β dari variabel X_5 bernilai positif yaitu 0,183. Penelitian ini membuktikan bahwa X_5 berpengaruh signifikan terhadap Y_2 sehingga hipotesis (H_{2e}) diterima.

Pengujian hipotesis (H_{2f}) dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Hipotesis diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< \alpha$ 0,050. Nilai F_{tabel} ($df_1 = 6 - 1 = 5$ | $df_2 = 76 - 6 = 70$) pada α 0,050 adalah 2,35. Nilai F_{hitung} untuk X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_5 secara simultan adalah 87,602 dan nilai signifikansi 0,000 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $87,602 > 2,35$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,050$. Penelitian ini membuktikan bahwa X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_5 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y_2 sehingga hipotesis (H_{2f}) diterima.

Keandalan pelaporan keuangan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan

bahwa informasi mengenai laporan keuangan suatu instansi adalah benar atau valid. Dalam penelitian ini dilihat beberapa variabel yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel-variabel tersebut meliputi kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, komitmen organisasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semua koefisien korelasi dari variabel yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak sama dengan nol. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hal ini berarti secara simultan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, komitmen organisasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Namun berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti saat melaksanakan survey lapangan, masih banyak instansi-instansi pemerintah yang dalam proses pengolahan data keuangan instansinya terdapat kendala-kendala, misalnya masih kurangnya jumlah sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan, belum maksimalnya penggunaan perangkat komputer dalam membuat laporan keuangan. Hal ini merupakan kendala yang memungkinkan sebuah laporan keuangan pemerintah menjadi tidak andal.

Pengujian hipotesis (H_3) dilakukan dengan membandingkan hasil hipotesis, dimananya H_{1b} pada hipotesis H_1 yang diterima sedangkan hipotesis lainnya yaitu H_{1a} , H_{1c} , H_{1d} , dan H_{1e} ditolak. Berbanding terbalik dengan hipotesis H_2 . Pada hipotesis H_2 , hanya H_{2b} lah yang ditolak sedangkan

hipotesis lainnya H_{2a} , H_{2c} , H_{2d} , dan H_{2e} diterima. Hal ini terlihat bahwa hubungan antara ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y_1) dengan keandalan pelaporan keuangan (Y_2) terjadi hubungan yang saling korban atau *trade off* demi kebermanfaatan dari laporan keuangan itu sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Secara parsial hanya Pemanfaatan Teknologi Informasi yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan sedangkan keempat variabel lainnya tidak mempengaruhi. Jika secara simultan Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1), Pengendalian Intern Akuntansi (X_3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), Komitmen Organisasi (X_4) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_5) memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir
- 2) Secara parsial hanya Pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan sedangkan keempat variabel lainnya mempengaruhi. Jika secara simultan X_1 , X_3 , X_2 , X_4 dan X_5 memiliki pengaruh signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan dan Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir
- 3) Adanya hubungan saling korban atau *trade off* antara Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir demi kebermanfaatan

dari laporan keuangan itu sendiri yang merupakan tujuan dari laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka dapat diberikan saran – saran sebagai berikut :

- 1) Bagi Subbagian Keuangan/ Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebaiknya konsisten dalam melakukan pencatatan akuntansi yang minimal perbulan, persemester dan pertahun dilakukan secara sistematis, berkelanjutan dan seragam sehingga laporan keuangan tersebut bisa disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- 2) Bagi Subbagian Keuangan/ Akuntansi pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir agar memperhatikan ketepatan waktu baik dalam penyusunan maupun penyajian laporan keuangan dengan tetap mempertahankan keandalan pelaporan keuangan tersebut.

Terlepas dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kelemahan yang membatasi kesempurnaannya yaitu keterlibatan Kepala Dinas atau Badan dalam mengisi kuesioner sangat sedikit, jika penelitian selanjutnya bisa mengarahkan seorang pimpinan untuk mengisi kuesioner maka akan memberikan hasil yang terbaik.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut

- 1) Memperluas sampel penelitian sesuai dengan topik penelitian antara lain dengan memasukan Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Rumah Sakit Pemerintah, Kecamatan dan Kelurahan serta pihak – pihak lain yang relevan.
- 2) Sebaiknya menambahkan variabel – variabel lain yang akan mempengaruhi hasil penelitian ini seperti pengawasan keuangan, *good governance*, dan sistem informasi akuntansi .
- 3) Penelitian ini dilakukan pada sektor publik terfokus pada Dinas, Inspektorat, Badan dan Kantor di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, sebaiknya penelitian selanjutnya dilakukan di sektor publik yang juga berfokus pada Lembaga Teknis Daerah yaitu Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Daniel Kartika dan Yohanes Suhardjo.2013.*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual)*.Jurnal STIE Semarang.Vol.5. No.3. Edisi Oktober 2013. ISSN 2252 – 7826
- Andriani, Wiwik.2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)*.Jurnal Akuntansi & Manajemen.Vol. 5.No. 1 Juni 2010. ISSN 1858 – 3687 hal 69 – 80
- Arens dkk. 2011. *Jasa Audit dan Assurance : Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*.Buku 2. Terjemahan oleh Amir Abadi Jusuf. Salemba Empat. Jakarta
- Aritonang, Aldiani Sultani dan Firman Syarif. 2009. *Faktor – factor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu*.Jurnal Akuntansi. Vol.12
- Azlim dkk.2012.*Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan DINAS DAERAH di Kota Banda Aceh*.Vol. 1, No.1, Agustus 2012. ISSN 2302 – 0164 pp. 1 – 14
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2013.*Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013, Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan*<http://www.bpk.go.id/2013/hasil-pemeriksaan-bpk.html>.(diakses25-10-2014)
- Darwanis dan Desi Dwi Mahayani. 2009. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*.Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 2. Juli 2009.Hal. 133 – 151
- Delanno, Galuh Fajar dan Deviani. 2013. *Pengaruh Kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 April 2013
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar – Dasar Ekonometrika*. Edisi 3.Jilid 1. Jakarta. Erlangga
- Hakim, Rahman.2009. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kompetensi Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin*. Tesis Progam PascaSarjana Universitas Sriwijaya

- Halim, Abdul dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat – Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah – Kapita Selekta Sistem Akuntansi Sektor Publik)*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi, Muhammad. 2012. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta : Salemba Empat
- Hanafi, Rustam. 2013. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.8 No. 16, Oktober 2013
- Ikhsan, Arfan dan M. Ishak. 2008. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriasari, Desi dan ErtambangNahartyo . 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pPemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*, dalam SNAXI. 23-24 Juli. Pontianak.
- Januarti, Indira dan Ashari Bunyaanudin.2006. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Keterlibatan Kerja terhadap Hubungan antara Etika Kerja Islam dengan Sikap terhadap Perubahan Organisasi*. JAAI, Vol.10, No. 1 : 17 – 35, Juni 2006
- Juwita, Rukmi. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.Vol.12, No.2, Desember 2013, Hal. 201 – 214. ISSN 1411 – 514X
- Karmila, Amries dan Edfan.*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)*.Jurnal SOROT Vol. 9. No.1 April hal 1 – 121. Lembaga Penelitian Universitas Riau. ISSN 1907 – 364 X, hal 25 – 42
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah.2012 .*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat
- Kusuma, Andra dkk.*Pengaruh Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya)*
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta. ANDI Yogyakarta
- Mustafa, Santiadji, Sutrisno, Rosidi. 2010. *Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari*, Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1 Vol.13, Juni 2010, hal 73–84
- Martani, Dwi dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah. Berbasis PSAK*. Buku 1.Jakarta : Salemba Empat
- Noor, Juliansyah. 2014. *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*.Jakarta : Gramedia
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam.2008.*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1 Vol.13, April 2008
- Pamungkas, Bambang. 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.Jurnal Ilmiah Ranggagading, 12 (2) : 82 – 93
- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. 2014. *Profil Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir*, <http://www.oganilirkab.go.id/index.php/profil-pemerintahan/unit-kerja>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007.*Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

- Ratifah, Iffa dan Ridwan, Muhammad. 2012. *Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Trikonomika Volume II, No. 1, Juni 2012, Hal. 29-39. ISSN 1411-514X
- Rosalin, Faristina dan Warsito. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*
- Sakaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Saleh, Rachmad. 2004. *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Tesis S2 Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang
- Sarwono, Jonathan. 2012. *IBM "Advanced Statistic" Prosedur-Prosedur Generalisasi dan Perluasan General Linear Model (GLM)*. Yogyakarta : ANDI
- Sugandi, Joe dkk. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada DINAS DAERAH sekabupaten Kuansing)*
- Suardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi ketiga. BPFE. Yogyakarta
- Syahrul, Muhammad dan Alfali, Nizar. (2000), *Kamus Akuntansi*, Penerbit Citra Harta Prima.
- Trisnarningsih, Sri. 2007. *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor*. SNA X Makasar, 26 – 28 Juli
- Triton, PB. 2006. *SPSS. Terapan Riset Statistik Parametrik*. Penerbit Andi Yogya. Yogyakarta
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)*. SNA XIII. 13 – 14 Oktober. Purwokerto. www.sna13purwokerto.com
- Zofir, Tasrif. 2009. *Pengaruh Pengawasan, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan*. Tesis Program PascaSarjana Universitas Sriwijaya